

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT



RENCANA
KINERJA
2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Tahun 2025 menjadi periode transisi penting bagi KPU setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam menghadapi tantangan kepemiluan di masa mendatang, diperlukan penyusunan rencana kerja yang terarah dan sistematis guna memperkuat tata kelola pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Papua Barat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi salah satu dasar utama dalam penyusunan rencana kerja ini. Berbagai aspek, seperti penyelenggaraan tahapan pemilu, partisipasi pemilih, tata kelola keuangan, serta penggunaan teknologi dalam pemilu, menjadi fokus utama dalam perencanaan ke depan. Identifikasi terhadap kendala yang dihadapi selama pemilu sebelumnya akan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif di tahun 2025. Selain itu, rencana kerja ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan kapasitas ini penting guna menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk peningkatan literasi pemilih, optimalisasi sistem informasi pemilu, serta pengelolaan logistik dan anggaran yang lebih efisien. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, rencana kerja ini juga akan berfokus pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan inovatif.

Dengan penyusunan rencana kerja yang komprehensif dan berbasis evaluasi, diharapkan KPU Provinsi Papua Barat dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa proses demokrasi di Papua Barat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan berintegritas.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya RKT adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Provinsi Papua Barat. Dalam RKT ini disajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat telah berusaha untuk menyusun RKT tersebut dengan tepat waktu. RKT ini berisi tentang implementasi Kinerja dari Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target kinerja.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025. Berikut ini merupakan visi dan misi yang KPU Provinsi Papua Barat yang selaras dengan visi dan misi KPU Republik Indonesia:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri,
Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL”***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut ambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi.

Meskipun visi organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam unit kerja sama dengan visi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penetapan misi masing-masing unit kerja harus ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya dan politik serta kearifan lokal. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai visi organisasi. Dalam menentukan misi organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sangat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut diatas, dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang handal sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri dan berintegritas;
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, baik layanan data dan informasi kepemiluan maupun memperbaiki kualitas data dan daftar pemilih, dalam rangka menjamin hak pilih warga;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

B. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Papua Barat adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam

pelaksanaan demokrasi di Provinsi Papua Barat.

C. Program

Pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat mengacu pada 1 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, antara lain:
 - a. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan
 - b. Oprasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat pada RKT tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten
3. Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih
4. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan
5. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

E. Indikator Kerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Berikut ini indikator kinerja yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat pada RKT Tahun 2024 :

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat
2. Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat
3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi

Papua Barat

4. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan
5. Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat terhadap pendidikan pemilih kepada masyarakat umum
6. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
7. Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi Papua Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

F. Target

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan memperkuat kelembagaan KPU, ditetapkan beberapa target strategis dalam Rencana Kerja Tahun 2025 untuk KPU Provinsi Papua Barat. Target ini mencerminkan fokus utama dalam perbaikan tata kelola pemilu, peningkatan partisipasi pemilih, serta optimalisasi sistem pendukung pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

1. Evaluasi dan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu
 - Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk aspek teknis, administrasi, dan partisipasi pemilih.
 - Menyusun laporan rekomendasi sebagai bahan perbaikan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029.
 - Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawas pemilu.
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
 - Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur KPU.
 - Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban anggaran.

3. Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Sosialisasi Pemilu

- Melaksanakan program pendidikan pemilih yang inovatif dan berbasis komunitas, terutama bagi pemilih pemula, perempuan, dan kelompok disabilitas.
- Memperkuat kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu secara lebih luas.
- Mengembangkan platform digital untuk meningkatkan akses informasi pemilih terkait pemilu dan tahapan-tahapannya.

4. Optimalisasi Teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilu

- Mengembangkan dan memperkuat penggunaan Sistem Informasi Pemilu guna meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih.
- Memastikan infrastruktur dan sistem teknologi informasi KPU berfungsi dengan optimal, termasuk keamanan data pemilih.
- Meningkatkan kesiapan dalam penggunaan teknologi dalam tahapan pemilu, termasuk e-rekap dan sistem pendukung lainnya.

5. Pengelolaan Logistik dan Keuangan yang Efektif

- Menyusun strategi distribusi logistik pemilu yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan di wilayah Papua Barat.
- Memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemilu melalui sistem pertanggungjawaban yang ketat.
- Melakukan monitoring dan supervisi atas pengelolaan keuangan dan logistik di seluruh jajaran KPU kabupaten/kota.

6. Persiapan Tahapan Awal Pemilu 2029

- Menyusun roadmap tahapan awal pemilu dengan fokus pada pemutakhiran data pemilih dan penguatan regulasi kepemiluan.
- Melakukan kajian hukum dan regulasi terkait pelaksanaan pemilu di Papua Barat guna mengantisipasi berbagai tantangan ke depan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan DPRD dalam perencanaan anggaran Pemilu 2029.

Target rencana kerja tahun 2025 ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat, meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemilu, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan, dan profesional. Dengan pencapaian target-target ini, diharapkan KPU dapat semakin dipercaya oleh masyarakat dan berkontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Papua Barat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang menjabarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target pencapaian Kinerja pada Tahun 2025.

Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Papua Barat diharapkan dapat menjadi bahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sehingga akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja.

Dalam dokumen ini terlampir *form* Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 KPU Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen RKT Tahun 2025.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

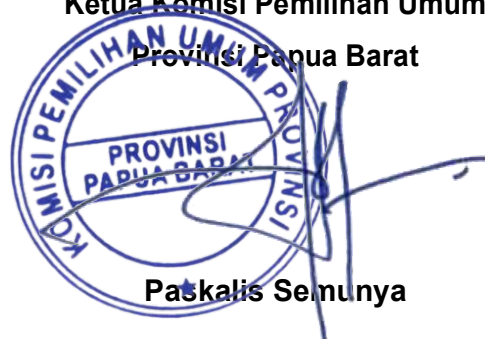
Nama/Unit : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Tahun : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Papua Barat	100%
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	100%
3	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat terhadap pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi Papua Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

Manokwari, Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat



Paskalis Semunya

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Papua Barat	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
4	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SAKTI yang Datanya Sesuai dengan Data SAKTI modul aset tetap dan persediaan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
11	Meningkatkan kualitas layanan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
12	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang dapat ditanggulangi	100%
13	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
14	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD dan DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
15	Tersedianya dokumen dan laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	100%
16	Tersedianya dokumen pemuktahiran data partai politik	Persentase laporan periodik semester pemuktahiran data partai politik	100%
17	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
18	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi Papua Barat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%
19	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
20	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
		Persentasi Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Provinsi Papua Barat	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat	100%
21	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Persentase Satker KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%
22	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
23	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi	100%

Manokwari, Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat



Michael Mote



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**